



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok C) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800-24 / 420 / 550
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADА PAUD/TK DEBORA
DESA TOUNDANOUW SATU KECAMATAN TOULUAAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA :**

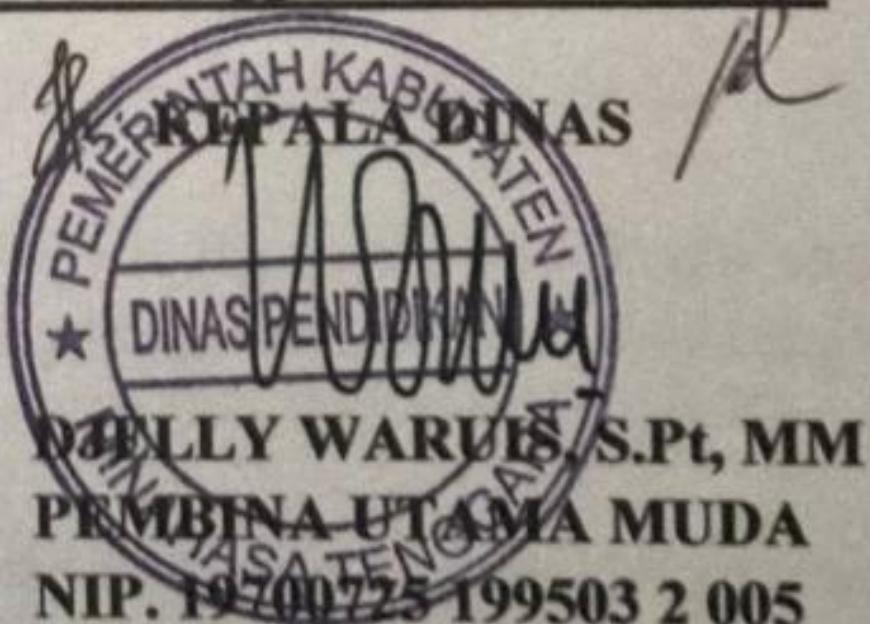
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan Penyelenggra;
d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c diatas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional Kepada PAUD/TK DEBORA Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, tentang kedudukan Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;

2. Berkas Permohonan Lembaga PAUD/TK DEBORA Nomor : 29/BPMJ-TK/MRT-TDW ST/VII-2019 dan Evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada :
 Nama Lengkap : **BRAYEN SEMBEL, SPd**
 Nama Lembaga : **PAUD/TK DEBORA**
 Alamat : **TOUNDANOUW SATU**
 Kecamatan : **TOULUAAN**
 Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**
KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 11 Juli 2021.
KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :
 1) Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2) Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-Undang yang berlaku;
 3) Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 4) Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan dicabut.
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 11 Juli 2019



Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
8. Arsip